

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 telah selesai.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Pangandaran, 29 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



IRWANSYAH, S.Sos

Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19701103 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISHUB TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja DISHUB Tahun Lalu n-2 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB	29
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISHUB	30
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISHUB	42
3.3	Program dan Kegiatan	45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHUB..... 64

BAB V PENUTUP 85



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Cikembulan No.105 Telp/Fax (0265) 7500675 Pangandaran 46396
Email : dishubpnd@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.964-Dishub/2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- : b. bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75); Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran



Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional



- 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran



Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);



- 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
- 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
- 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024; Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
- KEDUA : Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
- KETIGA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,



KEEMPAT : Dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 29 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



IRWANSYAH, S.Sos

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701103 199009 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pangandaran;
2. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran.



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.964-Dishub/2023
TANGGAL : 29 Juli 2023

PENGESAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Dinas Perhubungan
- Sistematika Perbahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
- B. Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Lalu N-2

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu N-2 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



IRWANSYAH, S.Sos

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701103 199009 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Rencana Kerja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun n-2, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian Rencana Kerja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Kerja RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Pangandaran memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu “ **Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa** ”.



Rencana Kerja Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);



26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa



- Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);



45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).
46. Keputusan Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts/964-Dishub/2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Lalu N-2

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu N-2 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SPKD TAHUN LALU n-2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, telah dilaksanakan sampai dengan Akhir Tahun 2022 dengan pagu anggaran total Rp65.596.730.806,- dengan capaian sebesar Rp58.860.532.522,- atau 89,73%.

Evaluasi pencapaian target dari pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sampai dengan akhir Tahun 2022, dapat disajikan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp23.517.500,- atau 62.28%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp37.760.000,-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebanyak 18 orang/bulan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2.240.222.694,- atau 89.67%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.498.102.465,-
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 12 dokumen, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp21.000.000,- atau 87.68%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp23.950.000,-
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 3 laporan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp69.450.000,- atau 91.67%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp75.760.000,-
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 12 laporan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp21.000.000,- atau 92.51%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp22.700.000,-
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 12 laporan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp147.000.000,- atau 92.62%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp158.700.000,-
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja sebanyak 5 dokumen, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp17.000.000,- atau 92.39%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp18.400.000,-



2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian kinerja sebanyak 12 orang, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp9.720.000,- atau 56.12%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp17.320.000,-
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 5 paket, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp4.988.000,- atau 99.94%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp4.990.788,-
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 5 paket, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp69.637.000,- atau 64.65%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp107.711.895,-
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian kinerja sebanyak 30 paket, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp9.524.000,- atau 99.96%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp9.527.754,-
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebanyak 20 paket, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp7.723.833,- atau 96.54%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp8.000.000,-
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 12 laporan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp198.038.943,- atau 99.01%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp200.000.000,-
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 1 unit, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp120.000.000,- atau 100 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp120.000.000,-
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 11 unit, dengan



- penyerapan anggaran sebesar Rp. 206.315.326,00 atau 81.48%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 253.194.504,00;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 23 unit, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.355.000,00 atau 44.66%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 9.750.000,00;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 0, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.829.000,00;

B. Program Penyalenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 514.020.500,00 atau 96.01%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 535.353.500,00;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebanyak 2224 unit, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.995.272.935,00 atau 85.41%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 52.680.209.200,00;
 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan capaian kinerja sebanyak 114 unit, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.200.000,00 atau 23.79%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 433.706.400,00;
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan capaian kinerja sebanyak 2500 kendaraan yang di uji, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.500.000,00 atau 91.04%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.32.400.000,00;



- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebanyak 12 laporan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 470.600.000,00 atau 86.66%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 543.010.000,00;
- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1. Penetapan kebijakan tata Kelola Andalalin, dengan capaian kinerja sebanyak 0 dokumen, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 49.932.500,00;

Rata-rata capaian kinerja dari keseluruhan program tersebut yaitu sebesar 91.40%. Meninjau kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2022, pencapaian kinerja menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup berhasil. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan ke depan, maka perlu optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Dinas Perhubungan sebagai dinas penghasil pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun yang menjadi target capaian PAD pada Dinas Perhubungan hanya pada 4 (empat) sumber saja, sedangkan untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, dikarenakan Kabupaten Pangandaran belum memiliki fasilitas alat uji dan gedung uji sebagai penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah evaluasi capaian target PAD pada 4 (sektor) penghasil pendapatan asli daerah sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 :



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
 BULAN DESEMBER 2022

REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	164.426.000	154.477.000	13.102.000	167.579.000	101,92%	(3.153.000)
4.1.2.02.19	Retribusi Terminal	65.288.000	66.558.000	5.967.000	75.525.000	111,08%	(7.237.000)
4.1.2.02.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.883.510.000	2.083.015.000	79.825.000	2.162.840.000	114,83%	(279.330.000)
4.1.2.03.19	Retribusi Pemberian Izin Trayek	3.000.000	300.000	-	300.000	10%	2.700.000
		2.116.224.000	2.304.350.000	98.894.000	2.403.244.000	113,56%	(287.020.000)

Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa rata – rata capaian PAD pada 4 sumber retribusi yang dihasilkan sampai dengan triwulan ke-IV melebihi dari target yang telah ditetapkan tahun anggaran perubahan 2022 dengan kategori sangat memuaskan. Adapun total realisasi sebesar Rp2.403.244.000,- atau 113,56% dari target yang di tetapkan di tahun anggaran perubahan 2022 sebesar Rp2.116.224.000,-.

- Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan antaralain :
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting nya sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir tepi jalan umum.
 2. Masi banyaknya titik-titik parkir yang dikuasai Ormas/Desa.
 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik PNS maupun Non PNS untuk pengawasan di lapangan.
 4. Belum adanya lokasi parkir/lahan parkir yang dibangun secara memadai.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang/Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100	100	80	60	75%	85	82	82%
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100	75	75%	100	92	92%
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100	100	80	60	75%	85	82	82%



		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	100	100	70	70%	100	90	90%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	75	75%	100	92	92%
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	75	75%	100	92	92%
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	75	75%	100	92	92%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	3	4	4	100%	4	11	46%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	0	4	0	0%	4	4	17%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	120	20	20	18	90%	20	58	48%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	2	3	3	100%	3	8	44%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	72	12	12	12	100%	12	36	50%



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30	5	5	5	100%	5	15	50%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	5	5	5	100%	5	15	50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	5	5	5	100%	5	15	50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	180	26	30	30	100%	30	86	48%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	120	17	20	20	100%	20	57	48%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60		10	0	0%	10	10	17%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	100%	1	3	50%



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	100%	12	36	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	90	15	15	15	100%	15	45	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	75	75%	100	91.67	92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	11	11	11	100%	11	33	50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	138	23	23	23	100%	23	69	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	0	4	0	0%	4	4	17%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	%	20	0	0	0	0%	15	5	25%
		Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	20	0	0	0	0%	5	1.67	8%
		Presentase Pelayanan Izin Trayek	%	30	0	0	0	0%	10	3.33	11%
		Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	%	75	45	50	36	72%	60	47	63%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	1	100%	1	2	40%



	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	3	0	1	1	100%	1	2	67%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	0	0	0%	1	1	25%
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	3	0	0	0	0%	1	1	33%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jenis	43	0	5	4	80%	7	11	26%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	1	0	0	0	0%	2	0	0%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2995	0	2140	2030	95%	3270	1767	59%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Unit	124	0	0	0	0%	25	25	20%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	695	0	500	60	12%	165	225	32%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal	8	0	0	0	0%	2	2	25%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal	Unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Unit	10	0	0	0	0%	10	10	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Unit	8	0	0	0	0%	2	2	25%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Orang	40	0	0	0	0%	7	7	18%



	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Laporan	60		12	0	0%	12	12	20%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	5	0	0%	4	4	7%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	60		12	12	100%	12	24	40%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	40	12	12	12	100%	10	34	85%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	13300	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1200	0	0	0	0%	0	0	0%
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	0	0	0	0%	0	0	0%
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%



	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	0	0	0	0%	1	0	33%
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	60		12	9	75%	12	21	35%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	60	12	12	12	100%	5	29	48%
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	1	0	0	0	0%	1	1	100%
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	18	0	5	0	0%	1	1	6%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	48	0	0	0	0%	1	1	2%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	0%



	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	1	0	0%	12	12	20%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	5	0	5	0	0%	1	1	20%
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Orang	7	0	0	0	0%	1	1	14%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	Laporan	60	0	0	0	0%	1	1	2%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan	25	0	0	0	0%	5	5	20%
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Orang	20	0	0	0	0%	4	4	20%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12	0	0	0	0%	1	1	8%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	60	0	0	0	0%	1	1	2%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	25	0	0	0	0%	1	1	4%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12	0	0	0	0%	1	1	8%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	63	0	0	0	0%	10	10	16%



	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	0	0	0%	1	1	2%
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5		0	0	0%	1	1	20%
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0%	1	1	20%



	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0%	1	1	20%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	50%
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	50%
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60		0	0	0%	12	12	20%



	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	0		0	0	0%	0	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4		0	0	0%	1	1	25%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	0	0	0%	12	12	20%



	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0%	1	1	20%
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0%	1	1	20%
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0%	1	1	20%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kabupaten Pangandaran masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang Perhubungan, belum adanya Peraturan Daerah tentang layanan transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara berlalu lintas, dan belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai salah satu pelaksana pelayanan di bidang transportasi.

Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga terus dibenahi guna memperbaiki/melengkapi prasarana lalu lintas, peningkatan pelayanan transportasi, dan meningkatkan komitmen untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Pangandaran.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IKK Output											
	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	49%	n/a	n/a	n/a	
	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	10%	n/a	n/a	n/a	
	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	17%	n/a	n/a	n/a	
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	
2	IKK Outcome											
	Rasio Konektivitas Kabupaten Kota	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	0,73%	n/a	n/a	n/a	
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Ruas Jalan Kabupaten Pangandaran	-	√	n/a	n/a	n/a	n/a	0,29%	n/a	n/a	n/a	



2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

Isu - isu Strategis Kabupaten Pangandaran yang merupakan poin penting bagi Dinas Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan transportasi/angkutan umum.
3. Meningkatkan kemampuan aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
4. Meningkatkan penggunaan dana APBN dan APBD untuk melaksanakan program kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun sebelumnya, maka apabila dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang dibuat, akan terjadi perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program/ kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program/ kegiatan cocok atau sama tetapi besarnya berbeda.

Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam pembuatan rancangan awal RKPD hanya mencantumkan perkiraan program/ kegiatan pada awal tahun, dimana dalam perkembangannya dipastikan akan ada program/ kegiatan tambahan atau perubahan program/ kegiatan berdasarkan usulan dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (12)
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	DINAS PERHUBUNGAN					DINAS PERHUBUNGAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				45,715,082,571.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12,767,704,147.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,884,812,236.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,784,021,293.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58,899,752.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38,281,200.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	56,752,952.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	36,134,400.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,146,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,146,800.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,704,553,165.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,580,395,546.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,547,688,765.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,434,731,146.00	



	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32,334,400.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21,134,400.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	124,530,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	124,530,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				26,920,400.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21,134,400.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26,920,400.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21,134,400.00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				136,074,000.00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				135,744,000.00	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	136,074,000.00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	135,744,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17,864,400.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17,534,400.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	17,864,400.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	17,534,400.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				416,377,262.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				404,126,262.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11,048,482.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11,048,482.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	85,918,519.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	85,918,519.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	15,103,795.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	15,103,795.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	84,688,560.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	84,688,560.00	



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	19,791,906.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	19,791,906.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199,826,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	187,575,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				205,000,000.00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	205,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9,914,212,800.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,944,770,028.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,561,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,659,057,228.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349,212,800.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	282,212,800.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				459,910,457.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437,035,457.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	416,205,838.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	393,330,838.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	24,050,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	24,050,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,654,619.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,654,619.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				31,830,270,335.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				983,682,854.00	



	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				204,905,000.00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	204,905,000.00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				26,115,685,155.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	550 Unit	25,669,541,047.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	550 Unit	458,085,254.00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	30 Unit	29,981,341.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	30 Unit	208,296,680.00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	184 Unit	416,162,767.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	184 Unit	-	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				3,829,124,000.00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dinas Perhubungan	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	3,829,124,000.00	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dinas Perhubungan	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	249,788,574.00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				159,070,000.00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	159,070,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	-	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				59,803,200.00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	59,803,200.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	43,003,200.00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				709,210,850.00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
										482,594,400.00	



	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	35,983,750.00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	-	
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	99,900,000.00	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	573,327,100.00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	482,594,400.00	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				89,164,250.00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	18,028,400.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	-	
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	3 Orang	41,136,010.00	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	3 Orang	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	29,999,840.00	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	-	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				111,474,560.00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	59,992,800.00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	-	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5 Laporan	19,994,100.00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5 Laporan	-	



	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	1,499,960.00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	-	
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	29,987,700.00	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	-	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				69,999,680.00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	69,999,680.00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	-	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				214,939,720.00	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	179,949,920.00	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34,989,800.00	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				72,154,560.00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	



	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42,149,800.00	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,004,760.00	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				39,999,800.00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	39,999,800.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				154,739,560.00	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	74,799,840.00	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49,689,920.00	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	



	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,249,800.00	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
--	--	-------------------	---	-----------	---------------	--	-------------------	---	-----------	--	--

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Langkaplancar	Bantuan PJU dibatas kecamatan langkaplancar blok gemyang desa jadimulya	10 titik	
2	PP Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Padaherang	Pengadaan PJU Desa Karangsari	10 Unit	
3	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Langkaplancar	Pengadaan PJU	5 titik	
4	PP Pembangunan sistem drainase kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Mangunjaya	PERMOHONAN PENERANGAN LAMPU MERKURI DI SEPANJANG JALAN DUSUN SUKARAJA DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA.	3 unit	
5	PP Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Cimerak	ADANYA KELUHAN MASYARAKAT DESA KERTAHARJA TERKAIT BELUM ADANYA PENERANGAN JALAN (PJU) DISEKITARAN JALAN PUSTU HINGGA JALAN CIBANGO YANG BELUM ADA PENERANGAN;	1 lokasi	



6	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Cigugur	PENGADAAN MERKURI DI 15 TITIK STRATEGIS DESA KERTAJAYA KEC CIGUGUR	15 titik	
7	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Sidamulih	PJU Dusun Sukajati	5 Unit	
8	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Padaherang	Pengadaan PJU untuk titik sarana ibadah	20 titik	
9	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Sidamulih	PJU Dusun Balengbeng	5 Unit	
10	PP Pembangunan akses jalan kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan - Pembangunan Jalan	Sidamulih	PJU Dusun Kr. Honje dan Pasir Muncang	2 Unit	
11	PP Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Pembangunan Jalan	Cigugur	PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN DESA BUNISARI	5 Paket	
12	PP Penyelenggaraan Pendidikan karakter - Rekonstruksi Jalan	Langkaplancar	PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN DESA BANGUNKARYA	5 Paket	
13	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Seluruh Kecamatan	PERMOHONAN PJU DI DUSUN KEDUNGREJO DESA WONOHARJO	1 lokasi	
14	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kalipucang	WARGA MEMINTA PENERANGAN JALAN UMUM YANG BERADA DI DUSUN CIPARAKAN DESA CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG UNTUK DIAKTIFKAN KEMBALI	1 DUSUN	
15	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kalipucang	PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PONPES IBNU AHKAM DAN PJU DISEKITAR PONPES SEBANYAK 6 TITIK DI DESA BANJARHARJA	6 titik	
16	PP Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Pengembangan Rumah Sakit	Cimerak	pengadaan penerangan jalan umum (PJU)	50 unit	



17	PP Pembangunan desa Presisi - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kalipucang	penerangan jalan umum (PJU)	10 unit	
18	PP Pembangunan desa Presisi - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kalipucang	penerangan jalan umum (PJU)	50 unit	
19	PP Pembangunan desa Presisi - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Pangandaran	pengadaan penerangan	10 unit	
20	PP Pembangunan Puskesmas - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Mangunjaya	Pemasangan lampu jalan umum (PJU) diharapkan merata karena masih banyak titik yang masih dirasa gelap dan rawan terjadinya kecelakaan dan tindak kejahatan	10 Unit	
21	PP Pembangunan Puskesmas - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Mangunjaya	Penerangan di wilayah desa sindangjaya dan di pemakaman umum dusun hegarmah	10 Unit	
22	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Parigi	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) UNTUK WILAYAH DESA KARANGJALADRI DI SETIAP TITIK 50 UNIT;	50 unit	
23	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Cimerak	PEMBANGUNAN PENERANG JALAN (PJU) DESA KERTAMUKTI YANG KURANG DAN MASIH HARUS ADA BEBERAPA PENERANG JALAN;	1 lokasi	
24	PP Desa Layak Anak (DeLA) - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Sidamulih	PERLU ADANYA PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM KHUSUSNYA DI DAERAH PELOSOK DI DESA KERSARATU;	1 lokasi	
25	PP Desa Tangguh Bencana - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sidamulih	SALURAN ANTISIPASI BANJIR DAN PERLU ADANYA PENAMABAHAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KHUSUSNYA DI DAERAH PELOSOK DUSUN PAMUNTUAN DESA KERSARATU;	1 lokasi	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam satu Tahun Anggaran, tidak hanya berasal dari perencana teknis dinas saja tetapi dalam pelaksanaannya dapat merupakan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan lainnya.

Proses usulan-usulan program / kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut dapat berupa proposal-proposal yang diajukan kepada SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, lalu dengan telah dilaksanakannya Musrenbang di tingkat kecamatan.

Usulan yang ada seperti pada program : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light/APILL, Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Pembangunan Terminal Tipe B.

Untuk selanjutnya SKPD memilah berbagai usulan-usulan dari para pemangku kepentingan tersebut dengan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sehingga dicapai suatu keputusan berupa program / kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran mempunyai arah kebijakan yang selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dimana Dinas Perhubungan memiliki peran sangat penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang yang berkaitan dengan Transportasi/Angkutan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan.

Dalam rangka meningkatkan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peningkatan Penggalan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan, Pelayanan Angkutan Umum/Transportasi guna menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata dunia, maka setiap program/ kegiatan harus sesuai dan terkoordinasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pangandaran yaitu dengan visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya – upaya yang dirumuskan melalui Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berimantqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;
3. Mengembangkan Aksesibilitas Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi, dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Serta Peningkatan Kompetensi Lulusan;
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel



6. Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Keterkaitan misi Kabupaten Pangandaran dengan Dinas Perhubungan Kabupten Pangandaran yaitu pada **Misi 6 “Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan”**. Dimana sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu dengan melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan untuk Meningkatkan Kualitas Infrastruktural Wilayah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

A. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan visi dan misi dari Dinas Perhubungan maka dapat diuraikan tujuan dari Rencana Kerja yaitu :

1. Terciptanya suasana kinerja yang harmonis, kondusif, aman dan nyaman serta mampu memberikan pelayanan administrasi dengan tugas secara optimal;
2. Tersedianya fasilitas prasarana perhubungan, yang akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu dalam



keselamatan lalu lintas, kelancaran lalu lintas, dan ketertiban lalu lintas;

3. Tersedianya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna meningkatkan keselamatan lalu lintas serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas;
4. Terwujudnya prasarana perhubungan yang handal, yang akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
6. Meningkatkan pelayanan transportasi, angkutan umum kepada masyarakat melalui penyediaan terminal angkutan;

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2024 didasarkan kepada hal-hal berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
2. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Pangandaran sebagai Prioritas Daerah Tahun 2020;
3. Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2018-2023 melalui Tematik Sektorial Jawa Barat;
4. Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Wilayah Priangan melalui Tematik Kewilayahan Jawa Barat;
5. Prioritas Pembangunan melalui Janji Gubernur 2018-2023;

B. Sasaran

Sedangkan sasaran dari Rencana kerja pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tertibnya penataan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan dan barang;
2. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dalam menunjang mobilitas wisatawan di objek wisata kabupaten pangandaran;
3. Terbinanya usaha angkutan penumpang;
4. Terpetakannya zona selamat sekolah;
5. Terlaksananya pemasangan fasilitas LLAJ;
6. Terpenuhinya kebutuhan prasarana perhubungan;
7. Tersedianya data potensi kebutuhan penyediaan PJU;



8. Meningkatnya pemenuhan penyediaan PJU;
9. Meningkatnya pendapatan dari pajak penerangan jalan;
10. Meningkatnya pendapatan dari pelayanan parkir;
11. Meningkatnya pendapatan dari pelayanan terminal;
12. Meningkatnya pendapatan dari pelayanan izin trayek;
13. Tersedianya peralatan yang selalu siap pakai dengan jumlah yang cukup, tenaga teknis yang terlatih dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran akan menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:



A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

5. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pelaporan Retribusi Daerah

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

7. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Penilaian Hasil Andalalin
 - b. Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
- 8. Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - d. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota



- a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11. Penetapan Rencanan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencanan Umum Jaringan trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Data Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkitan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut:

No	Pogram	Total Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp11.784.021.293,-
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp983.682.854,-
Jumlah		Rp12.767.704.147,-

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.767.704.147,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sejumlah Rp36.134.400,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sejumlah Rp2.146.800,-
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sejumlah Rp2.434.731.146,-
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sejumlah Rp21.134.400,-
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sejumlah Rp124.530.000,-
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

- a. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sejumlah Rp21.134.400,-
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaporan Retribusi Daerah dengan pagu anggaran sejumlah Rp135.744.000,-
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sejumlah Rp17.534.400,-
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp11.048.482,-
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp85.918.519,-
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sejumlah Rp15.103.795,-
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sejumlah Rp84.688.560,-
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sejumlah Rp19.791.906,-
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sejumlah Rp187.575.000,-
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,-
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.500.000,-



- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sejumlah Rp7.659.057.228,-
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp282.212.800,-
 - 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dengan pagu anggaran sejumlah Rp393.330.838,-
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sejumlah Rp24.050.000,-
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sejumlah Rp19.654.619,-
- B. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 1. Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sejumlah Rp25.669.541.047,-
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran sejumlah Rp249.788.574,-
 - 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sejumlah Rp43.003.200,-
 - 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sejumlah Rp482.594.400,-



Tabel TC.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISHUB Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12,767,704,147.00		19,332,337,833.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,784,021,293.00			14,026,244,547.00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38,281,200.00			64,826,355.00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	4 dokumen	36,134,400.00	Pendapatan Asli Daerah	4 dokumen	62,463,830.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	4 Laporan	2,146,800.00	Pendapatan Asli Daerah	4 Laporan	2,362,525.00	



					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,580,395,546.00			2,643,614,900.00	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	20 Orang/bulan	2,434,731,146.00	Pendapatan Asli Daerah	20 Orang/bulan	2,500,000,000.00	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	21,134,400.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	38,732,100.00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	4 Laporan	124,530,000.00	Pendapatan Asli Daerah	4 Laporan	104,882,800.00	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21,134,400.00			27,000,000.00	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	12 Laporan	21,134,400.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	27,000,000.00	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				135,744,000.00			222,600,000.00	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	135,744,000.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	222,600,000.00	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17,534,400.00			22,920,000.00	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	17,534,400.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	22,920,000.00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				404,126,262.00			429,981,142.00	



					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	5 Paket	11,048,482.00	Pendapatan Asli Daerah	5 Paket	12,184,080.00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	5 Paket	85,918,519.00	Pendapatan Asli Daerah	5 Paket	91,589,562.00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perhubungan	30 Paket	15,103,795.00	Pendapatan Asli Daerah	30 Paket	16,637,500.00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	20 Paket	84,688,560.00	Pendapatan Asli Daerah	20 Paket	90,000,000.00	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	10 Dokumen	19,791,906.00	Pendapatan Asli Daerah	10 Dokumen	19,920,000.00	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	12 Laporan	187,575,000.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	199,650,000.00	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				205,000,000.00			159,720,000.00	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1 Unit	205,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	159,720,000.00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,944,770,028.00			10,047,630,650.00	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	12 Laporan	3,500,000.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	3,859,900.00	



					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	7,659,057,228.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	9,679,000,000.00	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	282,212,800.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	364,770,750.00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437,035,457.00			407,951,500.00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perhubungan	12 Unit	393,330,838.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Unit	359,370,000.00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perhubungan	23 Unit	24,050,000.00	Pendapatan Asli Daerah	23 Unit	26,620,000.00	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan	1 Unit	19,654,619.00	Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	21,961,500.00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				983,682,854.00			5,306,093,286.00	
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-				
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen		



					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				458,085,254.00			3,535,906,736.00	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Perhubungan	550 Unit	208,296,680.00	Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	550 Unit	3,078,000,000.00	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Dinas Perhubungan	30 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah	30 Unit	35,890,736.00	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Dinas Perhubungan	184 Unit	249,788,574.00	Pendapatan Asli Daerah	184 Unit	422,016,000.00	
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				-			-	
					Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dinas Perhubungan	1 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Unit		
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				-			85,000,000.00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	12 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	85,000,000.00	
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				43,003,200.00			242,440,000.00	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Dinas Perhubungan	5 Unit	43,003,200.00	Pendapatan Asli Daerah	5 Unit	242,440,000.00	



					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				482,594,400.00			973,520,000.00	
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	12 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	36,000,000.00	
					Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	4 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	4 Dokumen	100,000,000.00	
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Dinas Perhubungan	12 Laporan	482,594,400.00	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	837,520,000.00	
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-			54,965,000.00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	1 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	19,965,000.00	
					Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Dinas Perhubungan	3 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah	3 Orang		
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Dinas Perhubungan	12 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	35,000,000.00	
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-			126,750,000.00	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	12 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	65,000,000.00	



					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	5 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	5 Laporan	25,000,000.00	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	2 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	2 Laporan	1,750,000.00	
					Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Perhubungan	4 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah	4 Orang	35,000,000.00	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			70,000,000.00	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	12 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	70,000,000.00	
					Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			-	
					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen		



					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen		
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			80,860,000.00	
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	46,585,000.00	
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	34,275,000.00	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			45,000,000.00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	45,000,000.00	
					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			91,651,550.00	



					Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen		
					Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	55,000,000.00	
					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	36,651,550.00	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (DBH Pusat).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
					DINAS PERHUBUNGAN								45.715.082.571,00				19.332.337.833,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								45.715.082.571,00				19.332.337.833,00		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								45.715.082.571,00				19.332.337.833,00		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.884.812.236,00				14.026.244.547,00		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								58.899.752,00				64.826.355,00		
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	4 Dokumen	100 %	56.752.952,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.463.830,00	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	4 Laporan	100 %	2.146.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.362.525,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.704.553.165,00					2.643.614.900,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	20 Orang/bulan	100 %	2.547.688.765,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.500.000.000,00
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													



						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Dokumen	100 %	32.334.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.732.100,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	4 Laporan	100 %	124.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	104.882.800,00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								26.920.400,00					27.000.000,00
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													



						Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	90 % 90 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	26.920.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	27.000.000,00
2	1	0	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							136.074.000,00					222.600.000,00
2	1	0	2.04	0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah												
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Dokumen	100 %	136.074.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	222.600.000,00
2	1	0	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							17.864.400,00					22.920.000,00
2	1	0	2.05	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Dokumen	100 %	17.864.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.920.000,00
2	1	0	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							416.377.262,00					429.981.142,00
2	1	0	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												



						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	5 Paket	100 %	11.048.482,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.184.080,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	5 Paket	100 %	85.918.519,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	91.589.562,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	30 Paket	100 %	15.103.795,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	16.637.500,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													



						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	20 Paket	100 %	84.688.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	90.000.000,00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	10 Dokumen	100 %	19.791.906,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	19.920.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 90 % 100 % 90 %	12 Laporan	100 %	199.826.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.650.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								150.000.000,00					159.720.000,00
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													



						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	1 Unit	100 %	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	159.720.000,00
2	1	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.914.212.800,00					10.047.630.650,00
2	1	0	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Laporan	100 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.859.900,00
2	1	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Laporan	100 %	9.561.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.679.000.000,00
2	1	0	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													



						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Laporan	100 %	349.212.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.770.750,00
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							459.910.457,00					407.951.500,00
2	15	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	12 Unit	100 %	416.205.838,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	359.370.000,00
2	15	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	23 Unit	100 %	24.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	26.620.000,00
2	15	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												



					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	100 % 100 % 90 % 90 %	1 Unit	100 %	19.654.619,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.961.500,00
2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							31.830.270.335,00					5.306.093.286,00
2	1	0	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							204.905.000,00					0,00
2	1	0	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
					Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Dokumen	1 dokumen	204.905.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	1	0	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							26.115.685.155,00					3.535.906.736,00
2	1	0	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
					Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 15 % 65 % 25 %	550 Unit	9 unit	25.669.541.047,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	550 Unit	3.078.000.000,00
2	1	0	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan												



						Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 15 % 65 % 25 %	30 Unit	9 unit	29.981.341,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	30 Unit	35.890.736,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
						Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 15 % 65 % 25 %	184 Unit	9 unit	416.162.767,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	184 Unit	422.016.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								3.829.124.000,00					0,00
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang													
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 10 % 15 % 65 %	1 Unit	0 terminal	3.829.124.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	0,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								159.070.000,00					85.000.000,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	12 Laporan	12 laporan	159.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	85.000.000,00
2	1	0	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								59.803.200,00					242.440.000,00
2	1	0	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 65 % 10 %	5 Unit	12 laporan	59.803.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	242.440.000,00
2	1	0	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								709.210.850,00					973.520.000,00
2	1	0	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													



					Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 25 % 15 % 65 %	12 Laporan	12 laporan	35.983.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	36.000.000,00
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
					Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 25 % 15 % 65 %	4 Dokumen	12 laporan	99.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000,00
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
					Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 25 % 15 % 65 %	12 Laporan	12 laporan	573.327.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	12 Laporan	837.520.000,00



																	Kabupate n/Provins i		
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								89.164.250,00						54.965.000,00
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Laporan	12 laporan	18.028.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	19.965.000,00	
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	3 Orang	12 laporan	41.136.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	3 Orang	0,00	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	12 Laporan	12 laporan	29.999.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	35.000.000,00
2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							111.474.560,00					126.750.000,00
2	15	02	2.08	0003		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal												
						Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 65 % 25 % 10 %	12 Laporan	5 laporan	59.992.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	65.000.000,00
2	15	02	2.08	0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota												
						Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	15 % 65 % 25 % 10 %	5 Laporan	5 laporan	19.994.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5 Laporan	25.000.000,00

2	1	0	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum													
						Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 65 % 25 % 10 %	2 Laporan	5 laporan	1.499.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	1.750.000,00
2	1	0	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan													
						Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 65 % 25 % 10 %	4 Orang	5 laporan	29.987.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	35.000.000,00
2	1	0	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								69.999.680,00					70.000.000,00
2	1	0	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 65 % 10 %	12 Laporan	13 unit	69.999.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupate n/Kota	12 Lapor an	70.000.000,00
2	15	02	2.10			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							214.939.720,00					0,00
2	15	02	2.10	0001		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 % 25 % 15 % 10 %	1 Dokumen	1 doku men	179.949.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapa n Kawasan Perkotaa n untuk Angkutan Perkotaa n Kewenan gan Kabupate n/Kota	1 Doku men	0,00
2	15	02	2.10	0002		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota												



					Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Presentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 % 25 % 15 % 10 %	1 Dokumen	1 dokumen	34.989.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							72.154.560,00					80.860.000,00
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 65 % 10 % 15 %	1 Dokumen	1 dokumen	42.149.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.585.000,00
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pelayanan Izin Trayek	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 65 % 10 % 15 %	1 Dokumen	1 dokumen	30.004.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.275.000,00
2	15	02	2.14			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							39.999.800,00					45.000.000,00
2	15	02	2.14	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Laporan	12 laporan	39.999.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	45.000.000,00
2	15	02	2.16			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							154.739.560,00					91.651.550,00
2	15	02	2.16	0001		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Dokumen	12 laporan	74.799.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Dokumen	12 laporan	49.689.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000,00
2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													



						Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 15 % 10 % 65 %	1 Laporan	12 laporan	30.249.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate n/Kota	1 Laporan	36.651.550,00
TOTAL													45.715.082.571,00					19.332.337.833,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Pangandaran, 29 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



IRWAN SYAH, S.Sos

Pembina Utama Muda-IV/c

NIP/19701103 199009 1 001

